

PEMBANGUNAN KONSTRUKSI TAHAP II DIMULAI

Tempat Parkir Khusus Ketandan Ditutup Hingga Desember

YOGYA (KR) - Guna mendukung penataan sumbu filosofis dan menyongsong implementasi kawasan pejalan kaki secara penuh (full pedestrian), Pemda DIY menutup sementara operasional Tempat Khusus Parkir (TKP) Ketandan di kawasan Malioboro.

Penutupan yang dimulai sejak 20 Juli hingga 31 Desember 2026. Tindakan itu dilakukan menyusul dimulainya pengerjaan konstruksi Tahap II.

Langkah strategis tersebut diambil guna menjamin keselamatan para pengguna jasa parkir, sekaligus memberikan ruang kerja yang memadai bagi kontraktor agar proyek dapat berjalan sesuai standar keselamatan kerja dan rampung tepat waktu.

Plt Kepala Balai Pengelolaan Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DIY, Rizki Budi Utomo MT mengatakan, proyek itu merupakan kelanjutan dari pembangunan tahun sebelumnya yang pelaksanaannya sengaja dibagi ke dalam dua fase akibat adanya keterbatasan anggaran.

"Kegiatan ini melanjutkan tahapan tahun kemarin (Tahap I). Karena sekarang masuk ke Tahap II pembangunan. Kita buat seperti itu karena memang ada keterbatasan anggaran, jadi dibuat menjadi dua tahap. Nanti targetnya akan rampung di akhir Desember," kata Rizki Budi Utomo MT, Senin (20/7).

Rizki mengatakan, pembangunan Tahap II ini dipastikan akan memberikan dampak positif bagi wisatawan maupun warga lokal. Pasalnya, daya tampung kendaraan di TKP Ketandan akan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan fasilitas pada Tahap I. Pasalnya untuk kendaraan roda dua (sepeda motor), kapasitas yang sebelumnya hanya mampu menampung 535 unit pada tahap I. Nantinya pada Tahap II akan mendapat penambahan daya tampung yang sangat

besar hingga mencapai sekitar 1.200 unit. Peningkatan serupa juga terjadi pada kendaraan roda empat (mobil). Apabila pada Tahap I kapasitasnya hanya 87 unit, setelah Tahap II selesai, TKP Ketandan akan mampu menampung hingga 118 unit mobil.

"Penambahannya sangat signifikan untuk menunjang pelestarian Malioboro. Walaupun pada November mendatang akan dilakukan uji coba kawasan full pedestrian, namun fungsi utama pengembangan TKP Ketandan adalah untuk mendukung penuh kenyamanan kawasan pejalan kaki secara jangka panjang," imbuh Rizki.

Guna meminimalkan dampak pembangunan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar pusat pertokoan pecinan tersebut, Dishub DIY menerapkan metode pelaksanaan kerja yang ramah lingkungan. Karena struktur bangunan menggunakan pondasi bored pile yang dipilih khusus untuk meredam getaran agar tidak mengganggu struktur bangunan eksisting di sekitarnya. Selain itu, struktur

utama bangunan menggunakan konstruksi baja pra-rakit (knock-down). Material baja diproduksi dan dirakit terlebih dahulu di workshop, sehingga pekerja di lapangan hanya fokus pada proses instalasi. Metode ini ditargetkan mampu mengurangi aktivitas pekerjaan berat di lokasi sekaligus mempercepat linimasa konstruksi. Adapun untuk mobilisasi alat berat, petugas dipastikan menggunakan jalur yang sama dengan Tahap I, lengkap dengan rekayasa lalu lintas yang terkoordinasi.

Selama masa penutupan, Dishub DIY mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kantong parkir alternatif di sekitar Malioboro. "Informasi mengenai titik parkir ini akan disebarluaskan secara masif melalui media massa dan media sosial.

Saat ini, Pemda DIY mengelola dua kantong parkir utama di kawasan tersebut, yakni Ketandan dan Beskalan. Sementara titik parkir lainnya dikelola oleh Pemkot Yogyakarta dan pihak swasta," terangnya.

(Ria)-d

FGD DI UNIVERSITAS JANABADRA
RUU Pertanahan Fondasi Kedaulatan Pangan



KR-Istimewa

Narasumber memaparkan materi dalam FGD mengenai RUU Pertanahan di UJB.

YOGYA (KR) - Kebijakan agraria nasional yang menempatkan tanah semata sebagai komoditas industri dinilai gagal total dalam menjamin ketahanan pangan nasional, bahkan justru memicu krisis di tingkat akar rumput. Dengan membiarkan tanah adat diprivatisasi demi keuntungan jangka pendek korporasi, negara secara perlahan meruntuhkan fondasi pangan komunal dan kearifan lokal yang terbukti tangguh selama berabad-abad.

Persoalan krusial ini mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'Penguatan Kebijakan Pertanahan Nasional Berbasis Dinamika Kedaerahan dalam Penyusunan Rekomendasi Legislasi Rancangan Undang-Undang Pertanahan' di Ruang Eksekutif Kampus Pusat Universitas Janabadra (UJB), Jalan Tentara Rakyat Mataram, Badran, Yogyakarta, Rabu (15/7).

Forum kolaborasi akademik yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Daerah dan Anggaran bekerja sama dengan UJB ini bertujuan melahirkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik daerah.

FGD menghadirkan tiga narasumber, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Pertanian UJB Ir Cungki Kusdarjito MP PhD, Dosen Pascasarjana Fakultas Hukum UJB Prof Dr R Murjiyanto SH MKn, dan Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN DIY Subagya SH MM.

Cungki Kusdarjito menilai krisis agraria Indonesia berakar dari cara pandang neoklasik yang memprioritaskan privatisasi, sehingga gagal melindungi peran vital tanah adat. "Kerangka pemikiran yang memprivatisasi tanah tidak bisa menangkap, apalagi melindungi, peran tanah adat sebagai fondasi sistem pangan komunal, sumber identitas kolektif, dan reservoir pengetahuan ekologis yang tidak tergantikan," tegasnya.

Ia mendesak agar naskah RUU Pertanahan mengadopsi model perlindungan ruang hidup lokal seperti konsep Satoyama di Jepang atau IPRA di Filipina yang berhasil menjaga ketahanan pangan berbasis komunitas adat. "Mempertahankan sasi di Maluku, subak di Bali, tanah ulayat Minangkabau, atau sistem wanatani Dayak bukan sekadar pilihan antara modernitas dan tradisi, melainkan fondasi kokoh untuk membangun kedaulatan pangan nasional yang sejati," imbuhnya.

Prof Murjiyanto menyoroti ancaman penyusutan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan, banyaknya tanah yang belum terdaftar, serta maraknya sengketa pertanahan.

(Dev)-f

JAGA MARWAH DAN KODE ETIK LEMBAGA DEWAN
BK DPRD Kota Yogya Matangkan Aturan Internal

YOGYA (KR) - Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Yogyakarta kini tengah bergerak cepat mematangkan penyusunan Tata Beracara. Regulasi internal ini untuk memperjelas mekanisme penanganan aduan terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dewan. Dalam prosesnya, BK membahas sejumlah poin krusial, mulai dari kepastian batas waktu penanganan aduan, mekanisme mediasi, hingga detail prosedur teknis pemeriksaan di lapangan.

Wakil Ketua BK DPRD Kota Yogya Krisnadi Setyawan, mengatakan jajarannya sudah beberapa kali melakukan pematangan dengan melibatkan tim ahli. Agenda ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan DPRD Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kode Etik. "Penyusunan Tata Beracara sangat mendesak agar pelaksanaan kode etik memiliki pijakan mekanisme yang jelas dan adaptif terhadap berbagai bentuk pelanggaran etik yang kian berkembang," terangnya, Senin (20/7).

Salah satu fokus utama yang dibahas oleh BK adalah

perlunya kepastian batas waktu penanganan aduan agar perkara yang masuk tidak berlarut-lurut tanpa penyelesaian. Di samping itu, forum juga mengusulkan hadirnya ruang mediasi sebagai salah satu tahapan penyelesaian awal. Opsi ini diprioritaskan khusus untuk perkara-perkara yang dinilai masih berada dalam batasan ranah etik ringan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Jika masih dalam ranah etik, perlu ada ruang untuk musyawarah atau mediasi terlebih dahulu. Namun, jika tidak tercapai penyelesaian, proses pemeriksaan tetap harus dilakukan," tegas Krisnadi.

Pembahasan juga menyoroti pentingnya pengaturan batas waktu pengajuan aduan pelanggaran etik sejak peristiwa terjadi. Ketentuan ini dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta mencegah adanya aduan atas peristiwa masa lalu yang sengaja dimanfaatkan demi kepentingan politis tertentu. Menanggapi dinamika tersebut, Tim Pakar BK berkomitmen untuk segera memasukkan berbagai masukan konstruktif ke dalam draf Tata Beracara yang sedang disusun.

Sementara Tim Pakar BK DPRD Kota Yogyakarta, Muhammad Affan SH SIP, turut menyampaikan pandan-

gannya mengenai beban kerja BK yang mencakup ranah penyelidikan, persidangan, hingga pengambilan keputusan akhir. Menurutnya, kompleksitas tugas tersebut menuntut adanya regulasi yang komprehensif agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

"BK memiliki tugas yang sangat berat, mulai dari menyelidiki, menyidangkan hingga mengambil keputusan. Karena itu, detail prosedur teknis perlu diatur secara jelas," ujarnya.

Pada akhir pembahasan,

disepakati bahwa seluruh pengaturan legal di lingkungan dewan harus dituangkan dalam bentuk Peraturan DPRD dan Keputusan DPRD, bukan melalui SOP. Untuk memperjelas pelaksanaan di lapangan, detail prosedur teknis penanganan aduan akan dimuat secara rinci dalam lampiran Tata Beracara. Hal itu juga mencakup aturan mengenai kompetensi pihak penyelidik, validitas alat bukti, serta asas keseimbangan hak antara pihak pengadu dan teradu.

(Dhi)-d

KISAH UMKM DI CIMAHI
Omzet Meningkat Berkat Pelatihan Sertifikasi Halal BRI Peduli



KR - Istimewa

Berawal dari usaha rumahan, BUNCY terus berkembang dengan mengedepankan cita rasa dan kualitas pada setiap produk yang dihasilkan

CIMAHI (KR) - Tidak sedikit usaha yang lahir dari masa-masa sulit. Begitu pula dengan BUNCY, usaha rumahan milik Lucy Emilda yang mulai dirintis pada tahun 2020 ketika pandemi memaksa banyak orang mencari cara untuk tetap bertahan. Dari dapur sederhana di Cimahi, Jawa Barat, Lucy mulai mengolah cheese stick dengan harapan sederhana, menghadirkan camilan yang disukai banyak orang sekaligus menjadi penopang ekonomi keluarga.

Berawal dari usaha rumahan, BUNCY terus berkembang dengan mengedepankan cita rasa dan kualitas pada setiap produk yang dihasilkan. Di balik setiap kemasan cheese stick, tersimpan semangat untuk menghadirkan camilan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan sekaligus membawa manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya.

Namun, membangun sebuah usaha bukanlah perjalanan yang selalu mudah. Di tengah persaingan industri makanan ringan yang semakin ketat, membangun kepercayaan konsumen menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Lucy dalam mengembangkan usahanya.

Baginya, kepercayaan merupakan modal penting agar sebuah produk dapat diterima oleh masyarakat. Karena itu, sertifikasi halal menjadi salah satu langkah yang diyakini mampu memperkuat kepercayaan tersebut sekaligus meningkatkan daya saing usaha.

"Usaha kuliner, khususnya yang telah memiliki sertifikat halal, lebih mudah mendapatkan kepercayaan konsumen," ujarnya.

Selain memberikan rasa aman bagi konsumen, sertifikasi halal juga membawa perubahan bagi Lucy sebagai pelaku usaha. Ia mengaku menjadi lebih percaya diri saat memperkenalkan produknya

kepada calon pembeli maupun mitra usaha.

Melalui fasilitasi Program Sertifikasi Halal dari BRI, BUNCY memperoleh kesempatan untuk melengkapi legalitas usahanya. Sertifikat halal menjadi pijakan awal bagi Lucy untuk melangkah lebih jauh dalam mengembangkan usahanya.

Setelah mendapatkan sertifikasi halal, Lucy tidak berhenti sampai di situ. Ia melanjutkan pengelolaan PIRT agar produknya memiliki legalitas yang semakin lengkap dan saya dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

"Setelah memiliki Sertifikasi Halal saya lanjut mengurus Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dengan kelengkapan tersebut saya bisa lebih luas melakukan jangkauan pasar dan berdampak pada peningkatan revenue usaha saya," cerita Lucy.

Bagi Lucy, manfaat program ini tidak hanya terletak pada sertifikat yang diterima, tetapi juga pada proses pendampingan



KR - Istimewa

Berbagai macam produk camilan BUNCY, usaha rumahan milik Lucy Emilda

JELANG HUT KEMERDEKAAN RI, DI HUT KE-3 FORUM PIMRED MULTIMEDIA
PLN UP3 Yogyakarta dan Wonosari Edukasi Masyarakat Gunakan PLN Mobile

YOGYA (KR) - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Yogyakarta turut hadir dalam momentum puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 Forum Pimpinan Redaksi (Forum Pimred) Multimedia Indonesia untuk mengedukasi masyarakat mengenai pemanfaatan aplikasi PLN Mobile. Melalui booth layanan yang dihadirkan oleh PLN UP3 Yogyakarta dan Wonosari pada kegiatan "Luwak White Koffie 3 Fun" di Alun-Alun Kidul Yogyakarta, Minggu (19/7), PLN mengajak masyarakat memanfaatkan layanan kelistrikan digital yang semakin mudah, cepat, dan praktis.

Kegiatan yang mengusung tema "Pers Kembali ke Rakyat" tersebut diikuti sekitar 5.000 peserta dan menjadi puncak rangkaian HUT ke-3 Forum Pimred Multimedia Indonesia. Ribuan peserta mengikuti berbagai kegiatan olahraga dan hiburan, seperti Fun Walk, Fun Bike, dan Fun Aerobic, yang berlangsung sejak pagi dengan antusiasme tinggi.

Momentum tersebut dimanfaatkan PLN untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat melalui edukasi penggunaan PLN Mobile. Petugas memberikan pendampingan secara langsung kepada pengunjung mulai dari proses mengunduh aplikasi, registrasi akun, hingga memperkenalkan berbagai fitur layanan yang tersedia, seperti pembelian token listrik, pembayaran tagihan, pelaporan gangguan, pengajuan tambah maupun turun daya, serta layanan kelistrikan lainnya. Masyarakat juga mendapatkan informasi mengenai promo diskon 50 persen untuk layanan tambah daya beserta tata cara pengajuannya.

General Manager PT PLN (Persero) UID Yogyakarta Deri Prasetyo Utomo mengatakan kehadiran PLN pada kegiatan yang dihadiri ribuan masyarakat Yogyakarta ini merupakan bagian



KR - Dok PLN

PLN UP3 Yogyakarta dan Wonosari edukasi masyarakat gunakan PLN Mobile.

dari komitmen perusahaan untuk memperluas literasi layanan digital sekaligus menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan pelanggan.

"PLN Mobile menjadi wajah pelayanan PLN saat ini. Seluruh kebutuhan pelanggan dapat diakses melalui satu aplikasi, mulai dari pembelian token, pembayaran tagihan, pelaporan gangguan hingga pengajuan perubahan daya. Melalui kegiatan ini kami ingin semakin banyak masyarakat mengenal dan memanfaatkan PLN Mobile sehingga layanan kelistrikan menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan dapat diakses kapan pun dibutuhkan," ujar Deri.

Menurutnya, transformasi digital yang dilakukan PLN tidak hanya menghadirkan kemudahan, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan melalui layanan yang semakin andal dan responsif.

Ketua Forum Pimpinan Redaksi Multimedia Indonesia, Bernadus Wilson Lumi mengapresiasi partisipasi PLN dalam memeriahkan HUT ke-3 Forum Pimred. Menurutnya, kehadiran booth PLN memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kami mengapresiasi dukungan PLN

yang tidak hanya berpartisipasi dalam memeriahkan HUT Forum Pimred, tetapi juga menghadirkan edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami mengajak seluruh peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk mengunduh dan menggunakan PLN Mobile karena berbagai layanan kelistrikan kini dapat diakses dengan mudah melalui satu aplikasi," kata Bernadus.

Salah seorang peserta, Asih, mengaku terbantu dengan pendampingan yang diberikan petugas PLN saat menggunakan aplikasi PLN Mobile. "PLN Mobile ini sangat membantu karena kita bisa menyampaikan keluhan kapan saja tanpa harus menunggu jam kerja. Sebagai ibu rumah tangga, layanan seperti ini sangat memudahkan saya ketika membutuhkan bantuan terkait listrik di rumah," ujarnya.

Melalui partisipasi pada HUT ke-3 Forum Pimred Multimedia Indonesia, PLN berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan PLN Mobile sebagai kanal utama layanan kelistrikan. Edukasi yang dilakukan secara langsung di tengah kegiatan masyarakat diharapkan mampu mempercepat adopsi layanan digital sekaligus mendukung transformasi pelayanan publik yang terus dikembangkan PLN.

(Ant)-d